

## Analisis Penerapan *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Pariwisata Bencana Lava Tour

Rintan Mirza Diani Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Yoanes Kevin Gratianus Simbolon Universitas Gadjah Mada, Indonesia

### **Abstract**

*Public affairs that get more complicated these days, forces the government to implement collaborative governance with the involved parties. One of the actions of implementing the collaborative governance is seen through management of Lava Tour in Merapi. The increasing number of society's interest in visiting the tourism site, inundates the government. Therefore, the government has to cooperate with private, and also with the citizen. This paper explains further about the form of collaborations that are conducted by the government, private, and the citizen. Based on the analysis, the form of collaboration that is conducted is Partnership that suits Bryson's (2014) classification.*

### **Keywords:**

*Collaborative Governance; Pariwisata; Lava Tour*

### **PENDAHULUAN**

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang menyumbangkan pendapatan daerah. Sektor ini cukup rentan keberadaannya, karena sektor pariwisata ini sangat di pengaruhi oleh banyak faktor. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pariwisata adalah bencana alam dan ulah manusia sendiri. Perubahan dalam pariwisata tersebut dapat sewaktu-waktu terjadi, perubahan tersebut dapat diakibatkan oleh bencana atau kejadian-keadian disekitar objek pariwisata (Henderson, 1991: 1). Hal tersebut terjadi di Kabupaten Sleman, tepatnya di kawasan wisata Gunung Merapi. Pada tahun 2010 terjadi letusan Gunung Merapi yang merupakan salah

satu letusan terbesarnya sepanjang sejarah. Akibat dari letusan tersebut banyak program dan kegiatan yang mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Disamping dampak secara ekologis, dampak lain yang ditimbulkan akibat letusan Gunung Merapi tersebut adalah dengan penurunan angka kunjungan wisata, penurunan tersebut mencapai 80 persen (BPS DIY, 2012). Kendala serta penurunan jumlah wisatawan tersebut tidak dipungkiri disebabkan oleh peran dari pemerintah yang belum bisa bekerja secara maksimal dalam mengelola pariwisata dan merespon ketika bencana melanda (Zaenuri, 2015). Suatu lokasi atau tempat dapat dikatakan wisata adalah ketika memiliki

keunikan, kekhasan, perbedaan, orisinalitas, keanekaragaman, dan kelokalan (Inskeep, 1994: 12) sehingga dapat menarik minat orang untuk mendatangi tempat tersebut. Termasuk juga wisata bencana, sebab lokasi dari bencana tersebut menarik minat masyarakat untuk mendatangi tempat tersebut. Selain itu lokasi bencana tersebut akan berbeda dengan lokasi-lokasi lainnya, maka akan ada keunikan dari tempat tersebut. Menurut Miller (2008) wisata bencana tersebut dapat menghadirkan perasaan bagi para pengunjungnya, seperti merasakan kesusahan yang dirasakan oleh korban di lokasi bencana tersebut.

Pariwisata bencana merupakan hal yang kompleks. Sebab, masyarakat yang mengunjungi tempat tersebut sangat dekat dengan lokasi bencana, khususnya jika dikaitkan dengan studi kasus dalam paper ini maka pengunjung sangat dekat dengan lokasi bencana Gunung Merapi. Sedangkan, jika menurut undang-undang, disekitar lokasi bencana terutama bencana alam yang rawan seperti gunung berapi seharusnya tidak boleh diadakan aktivitas apapun. Namun, keingintahuan dari masyarakat akan dampak yang ditimbulkan dari letusan Gunung Merapi tidak dapat dihilangkan. Sehubungan

dengan hal tersebut, jika pemerintah tidak dapat menekan keingintahuan masyarakat akan dampak dari letusan Gunung Merapi maka pemerintah harus mencari solusi lain. Salah satunya adalah dengan memberikan fasilitas kepada wisatawan agar dapat berwisata secara aman di sekitar lokasi bencana. Tentu saja hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja. Dibutuhkan peran serta bantuan dari pihak-pihak yang kompeten dibidangnya dalam memberikan fasilitas tersebut seperti pihak swasta serta masyarakat (Pitana, 2005; Branwell, 2007; Zhang, 2011). Keterlibatan sektor swasta dan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata bencana tersebut merupakan aplikasi dari *collaborative governance*. Bentuk kolaborasi yang dilakukan ketiga pilar yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat adalah dengan menggunakan model *shared vision* dan partisipasi, dimana upaya untuk melakukan koordinasi dan kolaborasi di bidang tata kelola pariwisata menurut Hall (1999) merupakan salah satu aksioma besar dalam kebijakan dan perencanaan pariwisata. Tentu saja pemerintah dalam hal ini masih mendominasi peran dengan memberikan komando terhadap swasta dan masyarakat. Namun dalam pengembangan pariwisata bencana

tersebut, swasta dan masyarakat pun memberikan peran secara aktif dan juga pemerintah memberikan ruang untuk swasta dan masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya. Hubungan yang terjalin ketiga pilar tersebut adalah kolaborasi. Dengan melakukan kolaborasi maka akan terlihat bagaimana kejelasan peran dari masing-masing *stakeholders*, penggabungan sumberdaya yang ada, dan berlaku dalam jangka waktu yang panjang (Dwiyanto, 2012; Ridha, 2018).

Pengembangan serta pengelolaan daerah wisata pada umumnya dikelola oleh pemerintah. Akan tetapi ketika kebutuhan masyarakat akan pelayanan pariwisata semakin meningkat, hal tersebut tidak diimbangi oleh peran pemerintah. Justru hal yang terjadi adalah sebaliknya, peran pemerintah justru semakin terbatas. Oleh sebab itu diperlukan pihak-pihak yang mampu mengakomodasi kebutuhan dari wisatawan, terlebih lagi wisata di kawasan Gunung Merapi tersebut tidak seperti lokasi wisata pada umumnya. Lokasi wisata di daerah Gunung Merapi merupakan lokasi yang rawan terhadap bencana. Terlebih lagi pariwisata bencana Lava Tour tersebut justru menitik beratkan pada wisata untuk melihat dampak yang diakibatkan dari letusan Gunung Merapi.

## TINJAUAN KONSEP

Konsep mengenai *collaborative governance* itu sendiri telah banyak dikemukakan oleh banyak ahli, salah satunya adalah menurut Fosler (2002) bahwa *collaborative governance* merupakan kerjasama kolaboratif yang melibatkan kerjasama antar pihak yang intensif, termasuk adanya upaya secara sadar untuk melakukan elignment dalam tujuan, strategi, agenda, sumberdaya dan aktivitas. Kedua institusi yang ada, pada dasarnya memiliki tujuan yang berbeda membangun shared vision dan berusaha mewujudkannya secara bersama-sama. Kemudian Sink (1998) menjelaskan bahwa kerjasama kolaboratif sebagai sebuah proses dimana organisasi-organisasi yang memiliki suatu kepentingan terhadap satu masalah tertentu berusaha mencari solusi yang ditentukan secara bersama dalam rangka mencapai tujuan yang mereka tidak dapat mencapainya secara sendiri-sendiri. Selain itu pendapat lain menurut Dwiyanto (2012) model *collaborative governance* adalah sebuah praktek manajemen yang menghargai keragaman nilai, tradisi, dan budaya organisasi, bekerja dalam struktur yang relatif longgar dan berbasis pada jaringan, dikendalikan oleh nilai-nilai dan tujuan bersama, serta memiliki kapasitas

mengelola konflik, yang mana menurut Bovaird & Loffler (2009) bahwa pilar-pilar governance dapat bersinergi apabila ada saling interaksi diantara *stakeholders* dengan tujuan dan misi yang sama.

Sebuah usaha kolaborasi dapat digolongkan sebagai *collaborative governance* jika memenuhi syarat, salah satu pendapat mengenai persyaratan *collaborative governance* dicetuskan oleh Zadek (2008), yakni:

1. Bahwa *collaborative governance* merupakan manifestasi dari beragam standar yang dipegang oleh masing-masing stakeholder yang terlibat;
2. Harus ada lebih dari satu macam stakeholder yang terlibat dalam *collaborative governance* dan tidak boleh terlibat akibat keterpaksaan yang ditekankan oleh satu stakeholder tertentu;
3. Bahwa *collaborative governance* meliputi satu atau lebih bagian yang sangat penting dalam pemerintahan (seperti desain, implementasi, dan aturan).

*Collaborative governance* sebagai basis pengelolaan pariwisata-bencana tentu saja dirumuskan dengan memadukan konsep governance dalam

pariwisata dengan fenomena bencana dalam situasi tidak normal yang mana membutuhkan modus-operandi yang bersifat individualistik, fleksibel, inovatif, diskontinuitas, eksperimental, intuitif dan berani mengambil resiko (Faulkner, 2007). Model-model kolaborasi diantara ketiga pilar governance yang berwujud output-input (Hui, 2010) dijadikan sebagai pola dasar untuk menjelaskan bagaimana bentuk variasi hubungan output-input tersebut pada perumusan visi bersama, partisipasi, jejaring dan kemitraan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan wawancara sebagai metode utama untuk mendapatkan data primer dan studi literatur sebagai metode kedua untuk mendapatkan data sekunder. Penelitian ini kemudian mengambil subjek penelitiannya yang mencakup sebuah organisasi yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang memiliki andil di dalam pengelolaan pariwisata bencana lava tour di Merapi. Unit analisis yang digunakan di dalam penelitian ini merupakan aktor yang memiliki andil besar di dalam kerjasama yang terjadi selama proses pengelolaan pariwisata bencana lava tour di Merapi.

## PEMBAHASAN

Sejauh ini ada beberapa pendapat mengenai aspek kunci karakteristik *Collaborative Governance*, salah satunya adalah menurut Ansell & Gash (2007) dimana mereka merumuskan enam aspek kunci yang menjadi karakteristik *Collaborative Governance* yakni:

1. Adanya forum yang diinisiasi atau melibatkan lembaga publik maupun aktor-aktor yang menjadi bagian lembaga publik secara formal.
2. Peserta di dalam forum tersebut juga termasuk aktor non publik/pemerintah.
3. Peserta yang terlibat memiliki andil langsung dalam pengambilan keputusan serta pembuatan kebijakan dan keputusan/kebijakan tersebut tidak harus merujuk pada aktor-aktor publik.
4. Forum terorganisasi secara formal dan pertemuan diadakan bersama-sama.
5. Forum bertujuan untuk membuat keputusan atas kesepakatan bersama atau konsensus.
6. Kolaborasi berfokus pada kebijakan dan manajemen publik

(pengelolaan aset, program, dan sebagainya).

Pendapat diatas semakin mendukung analisis kami sehingga kami menemukan ada 3 (tiga) sektor yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata bencana lava tour di merapi, yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal, yang telah kami analisis sebagai berikut :

### Pemerintah

Dalam menjalankan pariwisata bencana Lava Tour di Merapi tersebut, pemerintah tidak sendirian. Melainkan ada pihak swasta dan juga masyarakat yang ikut andil dan berperan terwujudnya program yang telah dirancang oleh pemerintah. Wujud dari adanya kolaborasi dalam pengelolaan pariwisata bencana Lava Tour tersebut dapat dilihat dari pembagian kerja masing-masing pihak. Pihak pertama yang berperan tentu saja pemerintah. Peran dari pemerintah sendiri tidak jauh dari kebijakan, bagaimana agar pelaksanaan dan pengelolaan pariwisata tersebut dapat berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan. Secara garis besar kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah demi menunjang pengelolaan pariwisata bencana tersebut berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat sekitar

dari destinasi wisata. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat sekitar daerah wisata bisa merasakan dampak, setidaknya dari segi ekonomi. Kebijakan lain yang diterapkan oleh pemerintah adalah aturan mengenai investasi di daerah wisata. Destinasi wisata tidak dapat dibiarkan dan menunggu untuk berkembang sendiri. Diperlukan strategi-strategi untuk mengembangkan daerah wisata tersebut, salah satunya dengan menarik investor. Namun tentu saja hal tersebut harus selalu diawasi oleh pemerintah daerah. Pemerintah lebih banyak bergerak di dalam pembuatan dan penerapan kebijakan dan juga mengawasi bagaimana jalannya pengelolaan pariwisata bencana tersebut. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adalah mengenai pembangunan kepariwisataan yang tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (RIPK) tahun 2012-2016.

Kebijakan tersebut berisi mengenai penggolongan kawasan bencana menjadi beberapa golongan. Golongan yang pertama adalah daerah terlarang (forbidden zone) di kawasan Gunung Merapi daerah ini adalah daerah yang paling rawan terkena bencana. Misalnya seperti awan panas. Maka dari hal itu kawasan tersebut harus dibebaskan dari

segala aktivitas. Kawasan tersebut harus benar-benar steril karena sangat berbahaya. Luasa dari wilayah tersebut kira-kira 749,3 ha disekitar Gunung Merapi. Kawasan kedua adalah daerah bahaya I (first danger zone) daerah ini masih cukup berbahaya karena ancaman dari bom gunung api yang masih membara akibat letusan-letusan di masa lampau.

Kawasan yang terakhir adalah daerah bahaya II (second danger zone) daerah ini berada disekitar lembah yang berhulu di puncak. Ancaman dari daerah ini adalah adanya lahar hujan yang bisa saja tiba-tiba terjadi. Akan tetapi yang menjadi sorotan adalah banyak dari ODTW (Objek dan Daya Tarik Wisata yang berada di kawasan golongan pertama ataupun berada di kawasan golongan kedua. Maka untuk mengatasi hal tersebut pemerintah dengan berpegang pada Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Perpres No. 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Gunung Merapi. Dalam peraturan tersebut mengatur bagi desa yang ingin melakukan kegiatan volcano tour harus meminta surat rekomendasi dari pemerintah daerah.

Selain itu, kegiatan yang berada di kawasan tersebut berupa mitigasi bencana dan juga kegiatan yang bersifat sementara. Selain itu peran dari pemerintah adalah

memberikan fasilitas pelatihan bagi swasta dan juga masyarakat yang mengelola pariwisata bencana tersebut. Sebab, swasta dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang bersinggungan langsung dengan wisatawan. Kemudian tentu saja pemerintah memberikan kemudahan dalam administrasi bagi swasta dan juga masyarakat dalam menjalankan pariwisata bencana tersebut.

### **Swasta**

Peran dari sektor swasta tentu saja tidak jauh dari bisnis dan mencari keuntungan. Dalam kolaborasi yang dilakukan dalam pengelolaan pariwisata bencana ini, pihak swasta bekerja sebagai perantara antara wisatawan dan warga masyarakat. Swasta ini yang kemudian menawarkan paket-paket wisata dan juga menawarkan jasa penginapan. Peran dari pihak swasta ini sangat penting, sebab sejauh ini pihak swasta yang lebih banyak melakukan penawaran-penawaran dan juga mengiklankan mengenai pariwisata bencana lava tour tersebut. Hal tersebut merupakan hal yang sangat baik, sebab masyarakat sekitar masih banyak yang berpendidikan terbatas sehingga dalam memberikan penawaran ataupun melakukan branding masih jauh berbeda dengan pihak swasta.

Pihak swasta ini cukup berperan dalam kelangsungan pariwisata bencana Lava Tour ini. Sebab wisatawan yang ingin berkeliling ataupun menginap dikawasan Gunung Merapi ini dapat bertanya pada pihak-pihak travel tour. Pihak travel tour inilah yang kemudian akan menjelaskan dan menawarkan paket-paket wisata yang sebelumnya telah dibicarakan bersama dengan masyarakat. Selain itu, travel tour ini juga bekerja sama dengan masyarakat berkaitan dengan penginapan. Kemudian peran dari sektor swasta adalah membuat paket-paket wisata seunik mungkin, sehingga dapat menarik wisatawan untuk datang kesana. Peran dari swasta ini cukup besar, sebab diketahui pada saat erupsi Gunung Merapi tahun 2010 cukup merusak wilayah sekitar. Tidak banyak orang yang tertarik untuk datang kesana, maka peran dari swasta ini adalah meyakinkan bahwa kawasan Gunung Merapi masih aman untuk dikunjungi. Penawaran yang dilakukan oleh swasta ini bisa melalui brosur yang disebar ataupun website yang dikembangkan oleh masing-masing travel tour. Tidak mudah bagi swasta untuk meyakinkan wisatawan bahwa paket tour yang ditawarkan dapat memberikan kenyamanan serta keamanan bagi wisatawan karena lokasinya.

Bagi keamanan pengunjung, untuk setiap pembayaran tiket masuk, sector swasta dan pemerintah sendiri sudah mempertimbangkan alokasi biaya. Jadi ketika pengunjung berwisata ke daerah Merapi tersebut, dalam tiket yang telah dibayarkan sudah termasuk asuransi jika sewaktu-waktu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

### **Masyarakat**

Dalam pengelolaan pariwisata bencana lava tour ini peran masyarakat cukup besar. Salah satunya adalah sebagai penjaja makanan disekitar daerah wisata. Selain menjual makanan, masyarakatpun menjual cinderamata yang cukup mencerminkan kekekhasan dari wisata Gunung Merapi. Jumlah pedagang yang berada di sekitar destinasi wisata Lava Tour tepatnya di area parkir Pangukrejo, tugu ambruk, batu allen, kaliadem dan tempat-tempat transit jeep wisata lainnya. Kira-kira sebanyak 70 orang dengan berbagai macam jenis barang yang dijualnya. Selain makanan, minuman, dan cinderamata terdapat juga pedang bunga, topi, dan kain batik di beberapa titik. Sistem berjualan disanapun adalah dengan membayar sewa tempat. Pedagang-pedagang tersebut terbagi menjadi 2 paguyuban yaitu paguyuban

Pangukrejo dan paguyuban Kinahrejo. Uang sewa yang harus dibayarkan kira-kira Rp 2000 – Rp 10.000, dasar dari penetapan harga sewa tersebut berdasarkan tanah yang digunakan oleh pedagang, apakah tanah tersebut merupakan tanah milik sendiri ataupun tanah sewa. Selain tanah, harga sewa dipengaruhi juga oleh apakah pedagang tersebut merupakan warga lokal atau warga baru yang ikut berjualan di daerah tersebut. Kemudian bagi wisatawan yang ingin berkeliling dan juga mengetahui sejarah yang berada di kawasan Lava Tour tersebut, mereka dapat menggunakan jasa pemandu. Akantetapi masih banyak kekurangan dalam segi pemandu. Selain keterbatasan dalam jumlah, sejauh ini masih sangat jarang ditemui pemandu yang mampu menguasai bahasa asing secara baik. Namun dengan adanya kolaborasi tersebut ikut memajukan perekonomian dari masyarakat sekitar.

Selain itu terdapat kelompok penyedia jeep dan juga motor trail. Anggota dari kelompok tersebut merupakan warga lokal. Pada tahun 2015 terdapat 71 unit jeep wisata yang terbagi menjadi 3 kelompok paguyuban. Kelompok paguyuban tersebut adalah paguyuban 86 Merapi Jeep Tour Community yang beranggotakan 29 orang, Paguyuban



Grinata beranggotakan 26 orang, dan Paguyuban Land Cruyser beranggotakan 16 orang. Dalam sekali keberangkatan tour jeep ini dapat mengangkut 5 orang. Untuk surasi wisata dan tarif disesuaikan dengan paket yang telah disediakan oleh travel tour dan disetujui oleh wisatawan. Jadi jeep ini merupakan milik pemerintah yang kemudian dikelola oleh swasta dan dalam penggunaannya dilakukan oleh warga lokal. Hal tersebut bagus karena memberdayakan masyarakat lokal, sehingga mereka dapat ikut andil dalam pengelolaan pariwisata tersebut. Tentu saja untuk penyewaan jeep dan motor trail tersebut masyarakat bekerja sama dengan swasta. Pihak swasta yang menyediakan paket-paket wisata dan kemudian masyarakat yang akan mengantarkan wisatawan untuk berkeliling sesuai dengan paket yang telah dipilih. Selain ketiga paguyuban yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat juga penyewaan jeep di area parkir Kopeng Kepuharjo, hanya saja jeep yang berada dilokasi ini hanya berjumlah 3 unit dan itu merupakan kepemilikan pribadi. Jeep wisata ini tidak beroperasi setiap hari, cenderung hanya beroperasi ketika akhir pekan atau saat hari-hari libur saja.

Selain penyewaan jeep, bagi wisatawan yang lebih santai atau ingin

menikmati berkeliling dengan kendaraan lain, terdapat pula penyewaan motor trail. Pada tahun 2015 tercatat keanggotaan dari kelompok ini berjumlah 40 orang. Untuk biasa sewa motor trail ini berkisar Rp 50.000 – Rp 60.000 dengan durasi perjalanan satu jam. Kepemilikan dari motor trail ini adalah milik pribadi. Akan tetapi meskipun motor trail ini milik pribadi, pemerintah ikut memberikan kontrol. Tidak semua pemilik motor trail dapat bergabung menjadi anggota. Hal tersebut dikarenakan pariwisata ini berada di daerah rawan bencana, sehingga perhatian akan keselamatan sangat diperhatikan.

Peran dari pemerintah, swasta, dan masyarakat tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Mereka harus berjalan seiringan dan saling memberikan dukungan. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Sleman, bahwa sesungguhnya tidak diperbolehkan adanya kegiatan disekitar kawasan Gunung Merapi. Akan tetapi masyarakat menginsiasi kan hal tersebut didukung dengan banyaknya masyarakat yang kemudian datang langsung ke lokasi. Pemerintahpun tidak dapat hanya tinggal diam, maka dari itu pemerintah melakukan hal-hal yang bisa dilakukan guna mendukung pariwisata tersebut agar

tetap aman. Peran dari pemerintah tersebut adalah dengan memfasilitasi swasta dan juga masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam mengelola pariwisata bencana tersebut perlu mengikuti pelatihan dan juga pembekalan. Materi yang diberikan tidak jauh dari mengenai penanggulangan ketika terjadi bencana secara tiba-tiba, karena kawasan wisata Lava Tour ini sangat berbahaya, maka perlu penanganan yang lebih. Selain itu, perlunya pengetahuan bagi swasta dan masyarakat mengenai keselamatan. Terutama ketika melakukan tour, perlu diperhatikan dengan cermat sebab wisata ini berada di daerah yang tidak stabil. Maka swasta dan juga warga lokal yang ikut andil dalam pengelolaan wisata tersebut harus lebih mengutamakan keselamatan dibandingkan hanya dengan keinginan tahuannya akan lokasi disana.

Kemudian dalam pembuatan pariwisata bencana lava tour ini juga dilakukan berbagai macam diskusi bersama yang melibatkan ketiga *stakeholders* agar tercapai tujuan yang menguntungkan semua pihak. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan focus group discussion (FGD) ketika penyusunan visi kepariwisataan. FGD tersebut diselenggarakan oleh Disbudpar Sleman dan juga bekerja sama dengan

Pusat Studi Pariwisata UGM. Selain kedua pihak tersebut, hadir juga perwakilan dari Karang Taruna Umbulharjo, perwakilan dari tim pengelola Lava Tour dan Perwakilan dari operator jeep. Dalam FGD tersebut semua pihak diperbolehkan memberikan pandangannya bagaimana pengembangan yang ingin dilakukan. Secara general semua pihak mendukung adanya pariwisata bencana Lava Tour tersebut, akan tetapi pemerintah terus menekankan bagi pihak pengelola untuk terus memperhatikan kawasan Gunung Merapi. Mengenai status Gunung Merapi yang merupakan gunung api teraktif di Indonesia. Ketiga, *stakeholders* yang berperan dalam pengelolaan wisata ini harus selalu berkoordinasi. Dan hal tersebut erjalan cukup lancar sehingga pariwisata bencana Lava Tour ini dapat dinikmati hingga sekarang

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of public administration research and theory*, 18(4), 543-571.
- Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta. (2012). *Statistik Pariwisata*.

- Beaumont, Narelle and Dianne Dredge. (2010). Local tourism governance: A comparison of three network approaches". *Journal of Sustainable Tourism*, Vol. 18(1), p.7-28.
- Bovaird, T and Loffler E (eds). (2009). *Public Management and Governance*. London: Routledge.
- Dwiyanto, Agus. (2012). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Faulkner, Bill. (2007). *The Future Ain't What it Used to be, Coping with Change, Turbulance, and Disasters in Tourism Research and Destination Management*. Canberra: Griffith University.
- Fosler R. Scott. (2002). *Working Better Together: How Government, Bioness and Non Profit Organization Can Achieve Public Purpose through Cross Sector Collabrator, Alience and Partnership*. Washington DC: Independent Sector.
- Hall, C. Michael. (1999). *Rethinking Collaboration and Partnership: A Public Policy Perspective*. *Journal of Sustainable Tourism*, Vol 7 No. 3 & 4.
- Henderson, J.C. (1999). *Tourism Management and the Southeast Asian Economic and Environmental Crises. A Singapore Perspective*. *Journal of Managing Leisure* 4, p.107-120.
- Hui, Glenn and Mark Richard Hayllar. (2010). *Creating Public Value in EGovernment: A Public-Private-Citizen Collaboration Framework in Web 2.0*. *The Australian Journal of Public Administration*, Vol. 69, No. S1, pp. S120–S131.
- Inskeep, Edward. (1994). *National and Regional Tourism Planning*. London: Routledge.
- Miller, Graham A., and Brent W. Ritchie. (2005). *A farming crisis or a tourism disaster? An analysis of the foot and mout disease in the UK*. *Tourism Program University of Canberra, Australia*.
- Ridha, M. (2018). *Capitalist Development and Economic Outcomes of the State in Indonesia and South Korea: A Marxist View*. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 3(2).
- Sink, D.W. (1998). *Interorganizational Collaboration*, dalam Shafaritz J.M. (Ed.), *The Encyclopedia of Public Policy and Administration*. Boulder, CO: Westview.

Zadek, Simon. (2007). Collaborative Governance: The New Multilateralism for the 21st Century.

Zaenuri, Muchamad. (2015). Pengelolaan Pariwisata Bencana Berbasis Kolaboratif Governance. UMY. Yogyakarta.